

MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS SOLUSI UNTUK MENGATASI MASALAH SEKOLAH MISKIN

Rambat Nur Sasongko
FKIP Universitas Bengkulu
email: rambatnur@yahoo.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menguji dan menyempurnakan model Manajemen Pendidikan Berbasis Solusi (MPBS) dalam mengatasi sekolah miskin di pesisir kota Bengkulu dan kabupaten Bengkulu Utara. Studi ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang dilakukan selama tiga siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, implementasi, observasi dan evaluasi, dan refleksi. Penelitian diselenggarakan di Taman Kanak-kanak/Raudatul Anfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah di pesisir Kota Bengkulu dan kabupaten Bengkulu Utara. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model MPBS yang didukung peran kepala sekolah kreatif mampu membantu sekolah miskin dalam memenuhi standar pelayanan minimal.

Kata kunci: manajemen pendidikan, model manajemen pendidikan berbasis solusi, sekolah miskin, standar pelayanan minimal

EDUCATION MANGEMENT SOLUTIONS MODEL TO OVERCOME POOR SCHOOL PROBLEMS

Abstract

The study aims to test and to complete model of Education Management Solutions (EMS) in solving poor school problems in the coastal town of Bengkulu and North sub-province Bengkulu. Three cycles classroom action research was applied in this research. Each cycle of it consists of planning, implementation, observation and evaluation, and reflection. This research was conducted in Nursery school/Raudatul Anfal, Elementary school/Madrasah Ibtidaiyah, Junior high school/Madrasah Tsanawiah, and Senior high school/Madrasah Aliyah in coastal town of Bengkulu and North sub-province Bengkulu. Data were collected by interview, observation and documentation technique. Descriptive and inductive analysis were employed to analyze the data. This study found that model of EMS supported by the role of creative school principal was able to help poor schools in fulfilling minimum service standard (MSS).

Keywords: education management, solution, poor school, minimum service standard

PENDAHULUAN

Para pakar pendidikan di Indonesia belum banyak yang memopulerkan terminologi sekolah miskin. Selain belum ada karya tulis ilmiah yang mengaji konsep dan fenomena tersebut, juga belum ada terminologi yang baku untuk mengangkat perbaikan nasib sekolah miskin. Penelusuran melalui internet

ditemukan dalam karya populer Aprianti (2008:2) yang memberikan terminologi sekolah miskin sebagai pendidikan yang membebaskan iuran dan pungutan segala-galanya dari siswa. Temuan yang lain juga terdapat pada tulisan Malik (2008:1). Malik memberikan definisi sekolah miskin sebagai pendidikan untuk anak-anak miskin.

Sekolah miskin sesungguhnya tidak hanya memiliki makna sempit seperti dikemukakan di atas dengan dibatasi pada satu sisi kajian. Sekolah miskin sesungguhnya mempunyai makna luas, yakni miskin atau kurang dari standar baku penyelenggaraan sekolah. Sekolah miskin didefinisikan sebagai ketidakmampuan sekolah memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan sekolah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Kepmendiknas No. 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TK, SD, SMP, SMA; PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Permendiknas No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan; dan Permendiknas No. 24/2009 tentang Standar Sarana dan Prasarana).

Penyelenggaraan sekolah di Provinsi Bengkulu secara komprehensif masih sedikit. Hasil penelitian yang dilakukan Susanti (2007:67-72) menunjukkan bahwa SPM tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan SD di Provinsi Bengkulu hanya mencapai 53% dan SMP di Provinsi Bengkulu hanya mencapai 76%. Hasil penelitian Saiful (2008: 83-84) tentang kondisi sarana dan prasarana di SMA Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan bahwa keterpenuhan SPM-nya hanya sebesar 68%. Penelitian Rahmi (2008:75-77) tentang penyelenggaraan TK di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan bahwa 86% guru TK belum memenuhi kualifikasi dengan rincian keterpenuhan sarana dan prasarana hanya sebesar 52% dan keterpenuhan pembiayaan sebesar 78%. Di samping itu, masih terdapat sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa dampak ketidakterpenuhan SPM menyebabkan sekolah kurang bermutu (prestasi rendah), kurang mampu bersaing (jarang memenangkan lomba), dan penyelenggaraan sekolah asal jalan. Implikasinya, sebagai bagian dari manajemen, manajemen pendidikan yang kurang bermutu akan memberikan kontribusi

pada pembentukan sekolah miskin.

Hasil penelitian Sasongko (2006:78-86) dan Sasongko (2008:8-12) menunjukkan bahwa sekolah unggul dapat terwujud melalui penerapan model manajemen berbasis sekolah (MBS) yang memberdayakan potensi sekolahnya sesuai dengan karakteristik keunggulannya masing-masing. Penelitian ini juga merumuskan model manajemen pendidikan berbasis solusi (MPBS) dan direkomendasikan untuk mengatasi sekolah yang kurang unggul dalam memenuhi SPM. Model MPBS merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kepada upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut tidak seluruhnya mampu diatasi oleh sekolah, namun sekolah perlu memberdayakan seluruh *stakeholders* terutama Dinas Diknas agar terlibat dan turut aktif mengatasi. Model ini diduga efektif mengatasi ketidakterpenuhan SPM di sekolah miskin. Oleh karena itu, melalui penelitian ini dapat menguji kehandalan model MPBS dalam mengatasi sekolah miskin.

Rumusan masalah umum penelitian ini adalah apakah model manajemen pendidikan berbasis solusi (MPBS) dapat mengatasi sekolah miskin di pesisir Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara. Rumusan masalah umum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam subrumusan khusus sebagai berikut. *Pertama*, apakah model MPBS dapat mengatasi ketidakterpenuhan SPM pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di di pesisir kota Bengkulu dan kabupaten Bengkulu Utara. *Kedua*, rumusan model MPBS yang bagaimanakah yang efektif mengatasi ketidakterpenuhan SPM. *Ketiga*, faktor-faktor apakah yang perlu disediakan agar model MPBS secara efektif dapat mengatasi ketidakterpenuhan SPM. *Keempat*, bagaimanakah rumusan kebijakan dalam bidang manajemen pendidikan untuk mengatasi sekolah miskin.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menguji dan menyempurnakan model MPBS yang efektif mengatasi sekolah miskin di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun tujuan khususnya untuk menguji kehandalan model MPBS dalam mengatasi ketidakterpenuhiannya SPM pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di pesisir kota Bengkulu dan kabupaten Bengkulu Utara; merumuskan model MPBS yang efektif mengatasi ketidakterpenuhiannya SPM; mendeskripsikan faktor-faktor yang perlu disediakan agar model MPBS secara efektif dapat mengatasi ketidakterpenuhiannya SPM; dan merumuskan kebijakan dalam bidang manajemen pendidikan untuk mengatasi sekolah miskin.

Penelitian bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan pendidikan. Secara teoretis penelitian ini mempunyai manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang konsep sekolah miskin dan manajemen pendidikan. Secara praktis penelitian ini mempunyai manfaat bagi pemecahan masalah sekolah miskin di berbagai wilayah, terutama pemenuhan standar pelayanan minimal, peningkatan citra diri sekolah, dan perbaikan mutu sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *educational action research* (penelitian tindakan kependidikan). Penelitian tindakan mengacu kepada model yang dikembangkan Burn (2005). Penelitian tindakan kependidikan dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang dihadapi sekolah melalui intervensi suatu tindakan yang efektif.

Metode penelitian tindakan kependidikan intinya dilakukan selama tiga siklus. Tiap siklus terdiri atas empat langkah, yakni perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta refleksi yang dilakukan secara sirkuler dan terus-menerus sehingga indikator dapat dicapai. Tindakan yang dilakukan berupa penerapan model Manajemen

Pendidikan Berbasis Solusi (MPBS). Model ini intinya meliputi pemberdayaan seluruh komponen guru, staf, dan komite sekolah secara terpadu dan mandiri. Kepala sekolah dalam memberdayakan segenap komponen tersebut harus lincah dan kreatif serta ditempuh dengan kekeluargaan, sehingga lebih akrab, terjalin hubungan emosional yang harmonis dan bertanggung jawab. Orientasi utama pada pengatasan keterpenuhiannya SPM. Dalam memenuhi SPM ini, baik guru, staf dan komite sekolah diberi keleluasaan berkeaktivitas dan tanggung jawab, sehingga SPM bisa terpenuhi secara optimal.

Subjek penelitian adalah sekolah miskin yang merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak dapat memenuhi SPM pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara. Sumber dan obyek data yang diteliti terdiri atas Sumber Daya Manusia (Kepala Sekolah, Guru, Kepala Dinas Diknas, Pengawas, Staf Tata Usaha, Siswa, orang tua siswa, Pengelola Komite Sekolah, dan masyarakat sekitar); dan struktur kurikulum, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, organisasi, pembiayaan, peran serta masyarakat, dan manajemen sekolah. Pemilihan Subjek penelitian ditentukan secara *purposive* (bertujuan).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif (persentase dan *weighted mean score*) dan perhitungan perbedaan (t-tes) diolah dengan SPSS versi 16.0 untuk menganalisis dampak penerapan model MPBS terhadap keterpenuhiannya SPM, dan analisis induktif sirkuler untuk mengolah informasi penerapan model MPBS dan faktor-faktor yang harus dipedulikan serta kebijakan manajemen pendidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data, baik secara kuantitatif maupun kualitatif diperoleh

makna penelitian dan dipaparkan sebagai berikut. *Pertama*, kemampuan model MPBS dalam mengatasi keterpenuhan SPM amat tergantung dengan kepemimpinan kepala sekolah dan faktor pendukung lainnya. Model MPBS yang dilaksanakan dengan kepemimpinan kepala sekolah yang kreatif, lincah dan mampu memberdayakan *stakeholders* secara kekeluargaan, hubungan emosional yang harmonis dan bertanggung jawab lebih mampu mengatasi keterpenuhan SPM. Model MPBS ini mampu mengatasi keterpenuhan bidang kurikulum, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, organisasi dan manajemen sekolah secara bermakna. Namun pada komponen pembiayaan dan peran serta masyarakat, model ini kurang optimal dalam mewujudkan keterpenuhan SPM. Hal itu karena menyangkut hambatan dalam mencari dukungan keuangan sekolah, kebijakan pemerintah tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak adanya perusahaan swasta yang mendukung, dan status orang tua murid yang kurang mampu secara ekonomis sehingga tidak dapat memberikan partisipasi keuangan.

Kedua, model MPBS yang efektif mengatasi keterpenuhan SPM sekolah bercirikan (1) orientasi utama mengatasi keterpenuhan SPM, (2) peran kepala sekolah yang kreatif, lincah dan pemberdayaan seluruh komponen guru, staf, dan komite sekolah secara terpadu dan mandiri dalam suasana kekeluargaan, akrab, terjalin hubungan emosional yang harmonis dan bertanggungjawab, (3) memberikan keleluasaan kepada guru, staf dan komite sekolah untuk berkreaitivitas dan tanggung jawab dalam memenuhi SPM, dan (4) melakukan tindakan perencanaan perbaikan baru, pelaksanaan, observasi, evaluasi dan refleksi secara terus menerus. Kunci sukses penerapan model amat tergantung kepada kepemimpinan kepala sekolah dan dukungan operasionalisasi pemenuhan SPM.

Ketiga, faktor-faktor yang perlu disediakan agar model MPBS efektif

mengatasi ketidakterpenuhan SPM adalah (1) kepemimpinan, (2) kebijakan, (3) struktur organisasi dan job deskripsi, (4) sarana dan prasarana, (5) pembiayaan, dan (6) pengawasan. Kepemimpinan merupakan faktor utama bagi implementasi MPBS. Kepala sekolah yang mempunyai kemampuan yang kreatif, lincah, dan selalu mempartisipasikan *stakeholders* (guru, staf, siswa, dan komite sekolah) dalam mewujudkan program pemenuhan SPM cenderung lebih berhasil mencapai target. Sebaliknya kepala sekolah yang hanya mengandalkan rutinitas dan mengerjakan tugasnya sendiri, cenderung kurang berhasil dalam mewujudkan memenuhi SPM di sekolah tersebut. Demikian pula kebijakan juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi MPBS. Kebijakan yang dibuat kepala sekolah mampu memperbaiki standar keterpenuhan SPM. Faktor struktur organisasi dan *job deskription* yang lengkap dan operasional juga amat mempengaruhi pelaksanaan penerapan model MPBS. Sekolah yang struktur organisasi dan *job deskription*-nya jelas, ternyata mampu memberikan kontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan penerapan model MPBS. Faktor sarana dan prasarana juga menentukan keberhasilan implementasi MPBS. Misalnya dalam memenuhi SPM pada komponen kurikulum (penyusunan silabus dan RPP pada mata pelajaran tertentu) membutuhkan komputer dan printer. Selanjutnya faktor pembiayaan juga mempunyai peranan vital menentukan keberhasilan penerapan model MPBS dalam memenuhi SPM. Sekolah yang relatif memiliki dana untuk modal awal lebih mampu memenuhi SPM daripada sekolah yang kurang memiliki dana. Faktor yang terakhir yaitu pengawasan juga amat menentukan keberhasilan penerapan model MPBS. Kepala sekolah yang kreatif menyusun agenda pengawasan cenderung lebih konsisten dan berhasil dalam membina staf untuk memenuhi SPM. Demikian pula kepala sekolah yang cerewet dalam bingkai

kekeluargaan cenderung lebih mampu memenuhi SPM daripada yang diam dan menunggu perintah atasan (Kabid Dikdas dan Dikmen).

Keempat, rumusan kebijakan dalam bidang manajemen pendidikan untuk mengatasi sekolah miskin berisikan tentang: (1) pengatasan sekolah/madrasah miskin sebagai prioritas Dinas Diknas dan Depag Kota/Kabupaten, dan (2) penugasan kepala sekolah/madrasah yang kreatif, lincah dan partisipatif untuk mengatasi sekolah miskin. Langkah yang ditempuh dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (a) identifikasi dan penentuan sekolah/madrasah miskin, (b) identifikasi dan perumusan solusi, (c) penyusunan langkah-langkah konkrit untuk memenuhi SPM, (d) penyediaan fasilitas dan pembiayaan, (e) monitoring dan evaluasi, (f) jadwal kerja, dan (g) penanggung jawab. Kebijakan diorientasikan kepada pengatasan kekurangterpenuhiannya SPM yang menyangkut komponen kurikulum, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, organisasi, pembiayaan, peran serta masyarakat, dan manajemen sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model MPBS yang memberdayakan seluruh komponen guru, staf, dan komite sekolah secara terpadu dan mandiri mampu meningkatkan keterpenuhiannya SPM. Kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan kreatif, lincah dan memberdayakan *stakeholders*. Kepala sekolah dalam memberdayakan segenap komponen tersebut ditempuh dengan jalur kekeluargaan, sehingga lebih akrab, terjalin hubungan emosional yang harmonis dan bertanggungjawab. Model MPBS yang berhasil tersebut mampu mengatasi keterpenuhiannya bidang kurikulum, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, organisasi dan manajemen sekolah secara bermakna. Namun pada komponen pembiayaan dan peran serta masyarakat, MPBS kurang optimal dalam mewujudkan keterpenuhiannya SPM.

Penerapan model MPBS ternyata tidak secara keseluruhan mampu mengatasi SPM. Hal itu karena menurut Andrey (2006: 34) bahwa untuk bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi sekolah, memerlukan fokus dan pengatasan satu persatu. Amat sulit bagi sekolah untuk dapat mengatasi masalah secara keseluruhan tuntas. Demikian pula menurut Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP, 2007: 45) bahwa upaya memenuhi SPM perlu dilakukan setahap demi setahap dan pada gilirannya harus mampu memenuhi secara menyeluruh. Hal itu karena standar pokok tersebut merupakan jaminan mutu dan akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat. Hasil penelitian Haeniah (2008: 87) mengungkapkan bahwa pengatasan sekolah yang kurang memenuhi standar amat sulit. Amat sulit bagi sekolah memenuhi kecukupan dalam sarana dan prasarana, pembiayaan, partisipasi masyarakat yang optimal. Beberapa faktor tersebut merupakan dilema yang dihadapi sekolah.

Penelitian ini menghasilkan model MPBS yang efektif. Model MPBS yang diterapkan pada siklus ketiga yang menekankan kepala sekolah kreatif, lincah dan pemberdayaan seluruh komponen guru, staf, dan komite sekolah secara terpadu dan mandiri lebih mampu mengatasi keterpenuhiannya SPM. Model MPBS yang efektif diterapkan oleh kepala sekolah melalui serangkaian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pelaporan dalam rangka memenuhi SPM; lebih menekankan orientasi kepada pengatasan masalah. Kepala sekolah yang kreatif dan inovatif jauh lebih berhasil jika dibandingkan dengan yang hanya mengandalkan rutinitas.

Kenyataan ini memang diakui oleh Sasongko (2006: 55) yang memberikan gambaran bahwa kepala sekolah yang kreatif mampu menciptakan program-program baru, berupa aktivitas baru seperti kegiatan penelitian tindakan perbaikan mutu pendidikan di sekolah dan dilombakan ternyata mampu meningkatkan kinerja guru

dalam memperbaiki mutu sekolah secara keseluruhan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Monk, Brent, and Roellke (2008: 3) tentang kinerja guru dalam memenuhi tugasnya melalui pemberian motivasi oleh kepala sekolah secara periodik, mampu meningkatkan hasil pembelajaran berupa dokumen pembelajaran yang lengkap dan hasil belajar siswa yang meningkat, serta memenuhi standar kurikulum sekolah. Kondisi ini amat penting bagi perbaikan mutu sekolah, sebab melalui kepala sekolah yang cerdas dan kreatif akan mampu memberikan kontribusi bagi perbaikan mutu sekolah.

Model MPBS jika diterapkan memerlukan persyaratan tertentu. Terdapat enam faktor yang perlu disediakan agar model MPBS dapat memenuhi SPM yaitu: (1) kepemimpinan, (2) kebijakan, (3) struktur organisasi dan job deskripsi, (4) sarana dan prasarana, (5) pembiayaan, dan (6) pengawasan. Beberapa faktor tersebut, sesungguhnya menurut Aprianti (2008: 3) merupakan faktor yang utama dalam konstalasi terjadinya sekolah miskin. Sekolah miskin terjadi karena kepala sekolah kurang peduli memperjuangkan sekolahnya menjadi standar, kebijakan pemerintah dan kepala sekolah kurang fokus terhadap pengatasan masalah pendidikan di sekolah, kurangnya sarana dan prasarana, dan pembiayaan dalam realisasi program sekolah. Demikian pula Andrey (2006: 35) juga menjelaskan bahwa mutu sekolah amat dipengaruhi oleh ketersediaan pembiayaan dan sarana dan prasarana. Pembiayaan merupakan faktor utama sekolah dapat mengoperasionalkan program-program sekolah. Senada dengan Andrey, Monk, Brent, and Roellke (2008: 3) juga memberikan klarifikasi bahwa selain pembiayaan faktor kepemimpinan kepala sekolah menentukan mutu sekolah. Mutu sekolah amat ditentukan oleh kepemimpinan yang mampu menghimpun pembiayaan, sarana dan prasarana, dan memberdayakan seluruh staf menggapai cita-cita sekolah. Selain hal

tersebut pengawasan juga merupakan faktor penentu dalam sebuah pembinaan sekolah (Sobri, Jihad dan Rochman, 2009: 41).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi sekolah miskin membutuhkan kebijaksanaan dari pihak yang berwenang (otoritas). Hal itu dibutuhkan mengingat bahwa kebijaksanaan merupakan acuan bagi operasionalisasi program-program sekolah/madrasah. Kebijaksanaan yang perlu dirumuskan berisikan tentang: (1) pengatasan sekolah/madrasah miskin sebagai prioritas Dinas Diknas dan Depag, dan (2) penugasan kepala sekolah/madrasah yang kreatif, lincah dan partisipatif untuk mengatasi sekolah miskin. Rumusan kebijakan ini menurut Gramage (2008: 2-3) amat penting dalam mengatasi sekolah miskin. Pemerintah perlu merumuskan kebijaksanaan yang sesuai dengan kondisi daerah dan sekolah. Oleh karena itu Sasongko (2008: 12) menyarankan agar sekolah perlu diberi otonomi untuk merumuskan kebijaksanaan sekolah yang lebih operasional dan memahami kebutuhan dan persoalan sekolah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan bahasan, beberapa simpulan dapat dirumuskan. *Pertama*, Model Manajemen Pendidikan Berbasis Solusi (MPBS) yang diorientasikan kepada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sekolah, kepala sekolah mampu berperan secara kreatif, lincah dan memberdayakan *stakeholders* dalam suasana kekeluargaan, akrab, menjalin hubungan emosional yang harmonis dan bertanggung jawab, mampu membantu sekolah miskin dalam memenuhi SPM. Penerapan model MPBS kurang dapat memenuhi SPM secara keseluruhan, namun dilihat dari hasil intervensi mampu menunjukkan perbaikan yang signifikan. *Kedua*, penerapan model MPBS perlu memperhatikan faktor kepemimpinan yang kreatif, kebijakan yang berpihak kepada sekolah miskin, struktur organisasi dan job

deskripsi yang jelas, sarana dan prasarana yang memadai, pembiayaan yang mencukupi, dan pengawasan yang sistematis. Sekolah miskin dapat diatasi dengan efektif, jika pemerintah sungguh-sungguh merumuskan kebijaksanaan berisi tentang pengatasan sekolah miskin yang menjadi prioritas di jajaran Dinas Diknas dan Depag dan pengangkatan kepala sekolah yang kreatif inovatif, berdedikasi, lincah dan memberdayakan *stakeholders*. Ketiga, strategi operasional yang perlu ditempuh oleh Wali Kota/Bupati dan pimpinan di jajaran Dinas Pendidikan dan Depag dalam mengatasi sekolah miskin perlu memilih pimpinan (kepala sekolah/ madrasah) yang kreatif inovatif, berdedikasi, lincah dan mampu memberdayakan *stake-holders*, serta dalam penunjukan hendaknya tidak melakukan jalur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), namun lebih menekankan kepada profesionalisme tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey, Robert J. 2006. "Teacher and Parent Causal Perception of School Problems". *American Educational Research Journal*, Spring 2006, Vol. 89, No.1, 29-37.
- Aprianti, Yenti. 2008. "Pendidikan Sekolah Miskin, Gratis Segala-galanya". <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0708/13/Jabar/25207.htm>. Diunduh pada tanggal 4 Februari 2010
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2007. *Standar Sarana dan Prasarana, Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Standar Penilaian*. Jakarta
- Burn, Robert B. 2005. *Research Methods: Action Research*. Sidney: Longman
- Gramage, David T. 2008. *Three Decades of Implementation of School-Based Management in The Australian Capital Territory and Victoria in Australia*. <http://nces.ed.gov/surveys/databased/Ed34652312>. Diunduh pada tanggal 14 Januari 2010.
- Haeniah, Een Y. 2008. "Kondisi Pendidikan di Kecamatan Bahuga sebagai Daerah Perbatasan Sumatera Selatan dengan Lampung". *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. FKIP Unila, Vol. 6, No.1, 83-90.
- Kepmendiknas Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TK, SD, SMP, SMA.
- Monk, David H., Brent, Brian O., and Roellke, Christopher F. 2008. "Teacher Resource Use within New York State Secondary Schools". <http://nces.ed.gov/pubs97/97535/97535e.asp>. Diunduh pada tanggal 7 Januari 2010.
- Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendiknas No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan
- Permendiknas No. 24/2009 tentang Standar Sarana dan Prasarana
- Rahmi, Ratu Ya. 2008. "Kondisi Keterpenuhan Standar Penyelenggaraan TK dan Upaya untuk Memenuhinya". *Tesis*. Bengkulu: Prodi MMP Unib.
- Saiful. 2008. "Kondisi Sarana dan Prasarana di SMA Kabupaten Bengkulu Utara". *Tesis*. Bengkulu: Prodi MMP Unib.
- Sasongko, Rambat Nur. 2006. "Manajemen Pendidikan pada Sekolah Unggul (Studi Deskriptif Kualitatif pada SMP Unggul di Kota Bengkulu)". *Laporan Penelitian*. Tidak diterbitkan. Bengkulu: Prodi MMP Unib.
- Sasongko, Rambat Nur. 2008. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Bengkulu: Prodi MMP Unib.
- Sobri, Jihad, Asep, dan Rochman, H. Chaerul. 2009. *Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Multi Pres-sindo
- Susanti, Erfi. 2007. "Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di SD Provinsi Bengkulu". *Laporan Penelitian*. Tidak diterbitkan. Bengkulu: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu.